

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian teori

2.1.1 Film

Film adalah lakon (cerita) gambar hidup. Menurut Edi Sedyawati, film itu tidak lebih dari proyeksi sebuah gambaran realita untuk menghibur penonton dan dibuat dengan pertimbangan-pertimbangan komersial. Film juga dapat digolongkan sebagai karya seni (Sedyawati, 2009: 108-109). Film juga merupakan potret dari masyarakat diman film itu dibuat. Film selalu merekam realitas yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan kemudian memroyeksikannya ke atas layar (Irwanto, 13: 1993 dalam Sobur, 2009: 127).

Istilah Film sebenarnya merupakan perkembangan dari istilah bioskop, istilah ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya melihat sesuatu yang hidup atau seolah-olah hidup. Apabila dilihat dari sudut penonton, istilah ini mempunyai dua makna. Pertama, suatu istilah yang menggambarkan sesuatu yang seolah-olah hidup dan sifatnya membawa penonton ke suatu kenyataan yang bisa ada ataupun bisa tidak ada di dalam hidup sehari-harinya (Arief, 2009:1)

Kedua, dengan adanya kebijakan pemerintah mengenai perfilman dan inisiatif dari pembuat film itu sendiri, muncul suatu usaha baru yang membawa penonton untuk menikmati isi dari film itu sebagai bentuk tayangan yang dapat mengingat kembali diri dan lingkungannya (Arief, 2009:1)

Film merupakan bidang kajian yang amat relevan bagi analisis struktural atau semiotika (Sobur, 2016:128). Seperti dikemukakan oleh Van Zoest (Van Zoest, 1993:109) film dibangun sebagai tanda-tanda semata. Tanda-tanda itu termasuk berbagai sistem tanda yang bekerja sama dengan baik untuk mencapai efek yang diharapkan.

2.1.2 Kemiskinan

Kemiskinan dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang, keluarga atau anggota masyarakat tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara wajar sebagaimana anggota masyarakat lain pada umumnya. Menurut Emil Salim (1984), bahwa kemiskinan lazimnya dilukiskan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok. Mereka dikatakan berada di bawah garis kemiskinan apabila pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling pokok, seperti pangan, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain (Abdulsyani 2012:190).

Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Menurut sejarah, keadaan kaya dan miskin secara berdampingan tidak merupakan masalah sosial sampai saatnya perdagangan berkembang dengan pesat dan timbulnya nilai-nilai sosial yang baru. Dengan berkembangnya perdagangan ke seluruh dunia dan ditetapkannya taraf kehidupan tertentu sebagai suatu kebiasaan masyarakat, kemiskinan muncul sebagai masalah sosial. Pada waktu itu individu sadar akan kedudukan ekonomisnya sehingga

mereka mampu mengatakan apakah dirinya kaya atau miskin. Kemiskinan dianggap sebagai masalah sosial apabila perbedaan kedudukan ekonomis para warga masyarakat ditentukan secara tegas. (Soejono Soekanto, 2012:320).

Faktor ekonomi kemudian dijadikan tolak ukur dalam menilai tingkat kemiskinan: sebagai bukti faktor ini banyak diperjuangkan oleh berbagai kalangan masyarakat. Bahkan faktor ekonomi sering dijadikan kambing hitam dari penyebab timbul masalah sosial (Abdulsyani, 2012:191).

2.1.2.1 Teori tentang Kemiskinan

Menurut Suparlan (2014:315) kemiskinan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan pada sejumlah atau golongan orang di bandingkan dengan standar kehidupan yang rendah, ini secara langsung nampak pengaruhnya terhadap tingkat keadaan kesehatan, kehidupan moral dan rasa harga diri mereka yang tergolong sebagai orang miskin.

Menurut Ritonga (2003:1) memberikan definisi bahwa kemiskinan adalah kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang di alami seorang atau rumah tangga sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal atau yang layak bagi kehidupannya. Kebutuhan dasar yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan kebutuhan pangan, sandang, perumahan dan kebutuhan sosial yang diperlukan oleh penduduk atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.

Adapun teori-teori dalam memahami kemiskinan adalah sebagai berikut:

Teori Neo-Liberal

Shano, Cheyne, O'Brien dan Belgrave berargumen bahwa kemiskinan merupakan persoalan individual yang di sebabkan oleh kelemahan dan pilihan individu yang bersangkutan. Kemiskinan akan hilang sendirinya jika kekuatan pasar di perluas sebesar-besarnya dan pertumbuhan ekonomi dipacu setinggi-tingginya. Secara langsung, strategi penanggulangan kemiskinan harus bersifat residual sementara, dan hanya melibatkan keluarga, kelompok swadaya atau lembaga keagamaan. Peran negara hanyalah sebagai penjaga yang baru boleh ikut campur manakala lembaga-lembaga di atas tidak mampu lagi menjalankan tugasnya.

Teori Sosial Demokrat

Teori ini memandang bahwa kemiskinan bukanlah persoalan individu, melainkan struktural. Kemiskinan disebabkan oleh adanya ketidakadilan dan ketimpangan dalam masyarakat akibat tersumbatnya akses kelompok kepada sumber kemasyarakatan. Teori sosial demokrat menekankan pentingnya manajemen dan pendanaan negara dalam pemberian pelayanan sosial dasar bagi seluruh warga negara dan di pengaruhi oleh pendekatan ekonomi manajemen permintaan gaya Keynesian. Meskipun teori ini tidak setuju sepenuhnya terhadap pasar bebas kaum sosial demokrat tidak anti sistem ekonomi kapitalis. Bahkan kapitalis masih dipandang sebagai bentuk organisasi ekonomi yang paling efektif. Hanya saja sosial demokrat merasa perlu ada sistem negara yang mengupayakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Pendukung sosial demoktat berpendapat bahwa

kesetaraan merupakan prasyarat penting dalam memperoleh kemandirian dan kebebasan. Pencapaian kebebasan hanya dimungkinkan jika setiap orang memiliki sumber kesejahteraan. Kebebasan lebih dari sekedar bebas dari pengaruh luar, melainkan bebas pula dalam menentukan pilihan.

Teori Marjinal

Teori ini berasumsi bahwa kemiskinan di perkotaan terjadi di karenakan adanya kebudayaan kemiskinan yang tersosialisasi di kalangan masyarakat tertentu. Oscar Lewis (1966) adalah tokoh dari aliran teori Marjinal, konsepnya yang terkenal adalah *Culture of Poverty* . menurut Lewis, masyarakat di dunia menjadi miskin karena adanya budaya kemiskinan dengan karakter apatis, menyerah pada nasib, sistem keluarga yang tidak mantap, kurang pendidikan, kurang ambisi membangun masa depan, kejahatan dan kekerasan yang banyak terjadi.

Teori *Development*

Teori Sevelopmental (bercorak pembangunan) muncul dari teori-teori pembangunan terutama neo-liberal. Teori ini mencari akar masalah kemiskinan pada persoalan ekonomi dan masyarakat sebagai satu kesatuan, ada tiga asumsi dasar dari teori ini:

1. Negara menjadi miskin karena ketiadaan atribut industrialisasi, modal kemampuan menejerial, dan prasarana yang diperlukan untuk peningkatan ekonomi
2. Pertumbuhan ekonomi adalah kriteria utama yang dianggap dapat mengatasi masalah-masalah ketimpangan

3. Kemiskinan akan hilang dengan sendirinya bila pasar diperluas sebesar-besarnya dan pertumbuhan ekonomi di pacu setinggi-tingginya.

2.1.3 Tragedi politik tahun 1965

Pada Mei 1965 Jakarta nampak bagai kota yang dibebaskan. Di ibukota dan seluruh wilayah negeri ini, jutaan orang Indonesia merayakan ulang tahun PKI ke-45. PKI merupakan partai terbesar di Indonesia dan partai komunis terbesar ketiga di dunia, menyatakan diri memiliki 15 juta anggota dan simpatisan yang terorganisasi. Pada tahun-tahun sebelum peristiwa 1 Oktober 1965, Partai Komunis Indonesia (PKI) tampak berkembang pesat. Dari sebuah partai kecil dengan latar belakang yang diragukan iktikat baiknya karena berperan dalam Pemberontakan Madiun pada tahun 1948, ia tumbuh menjadi sebuah partai massa yang hebat, semua itu dicapai berkat pimpinan licik D.N Aidit, yang menjadi ketua partai pada tahun 1951. Bukan melalui cara bersekongkol, sembunyi-sembunyi, atau bergerak di bawah tanah, melainkan jalan parlementerlah yang dipilih Aidit untuk meraih kekuasaan. Faktor tunggal terpenting adalah persahabatannya dengan Presiden Soekarno (Nugroho, 2008:3).

Pada 1 Oktober 1965 di ibu kota oleh “Gerakan 30 September” direncanakan dalam serentetan pertemuan yang dihadiri para pemimpin Biro Khusus PKI dan para simpatisan yang ada dalam Angkatan bersenjata, yang mendapat tugas menjalankan apa yang sudah direncanakan. Pada pertemuan pertama, yang hadir baru pertama kali saling melihat, menurut Untung, pertemuan tersebut memang dimaksudkan agar kawan-kawan seideologi dapat saling

berkenalan, yang hadir pada pertemuan pertama adalah Sam dan Pono dari Biro PKI, Kolonel Abdul Latief Komandan Brigade Infanteri I Komando Daerah Militer Lima Djaja, Letnan Kolonel Untung Komandan Batalyon Kawal Kehormatan I Resimen Tjakrabirawa, Mayor Udara Sujono Komandan Resimen Kesatuan Pertahanan Pangkalan dari Pangkalan Udara Halim, dan Kapten Wahjudi sendiri sebagai Pejabat Komandan Batalyon Pertahanan Udara Ringan I Komando Daerah Militer Lima Djaja.

Pada pertemuan kedua, mereka diberitahu tentang adanya “Dewan Jendral” dan mereka membicarakan kesulitan ekonomi yang tengah dialami oleh kalangan bawah dalam Angkatan Bersenjata. Pada pertemuan ketiga, keempat dan kelima ditambah satu orang yang menghadiri yaitu Mayor Agus Sigit, yang menjabat sebagai Komandan Batalyon 203, Komando Daerah Militer Lima Djaja. Dalam pertemuan tersebut mereka mempelajari secara terperinci apa kiranya yang dapat dilakukan untuk menggagalkan kup “Dewan Jendral”. Mereka memutuskan bahwa:

1. Diperlukan sekali suatu rencana untuk mengatur gerakan dan menetapkan tugas –tugasnya serta menunjuk pasukan-pasukan mana yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana itu.
2. Pasukan – pasukan yang dapat diberi kepercayaan pada saat pertemuan dilangsungkan, terdiri dari satu kompi Tjakrabirawa, dua peleton dari Brigade Infanteri I, satu batalyon dari pasukan para Angkatan Udara, dan sejumlah 2.000 anggota terlatih dari berbagai anak berorganisasi PKI,

seperti Pemuda Rakyat, Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia), juga ditambah sekelompok oknum-oknum pilihan dari Pemuda Marhaenis.

3. Sejumlah tertentu Jendral dan VIP perlu “diamankan” pada permulaan operasi, mengingat bahwa mereka akan menentang Gerakan tersebut.
4. Pada tahap pertama, tokoh-tokoh berikut ini harus ditangkap, diculik, atau dibunuh: Jendral A.H Nasution, Letnan Jendral Achmad Yani, Mayor Jendral Suprpto, Mayor Jendral Har-yono, Mayor Jendral S. Parman, Brigadir Jendral Sutojo, Brigadir Jendral Pandjaitan, dan Brigadir Jendral Sukendro.
5. Untuk menjalankan operasi tersebut diatas, pasukan-pasukan Angkatan Darat akan dikerahkan guna memberi kesan bahwa operasi ini adalah “semata-mata tindakan intern dalam Angkatan Darat”
6. Kota Jakarta perlu dibagi dalam sektor-sektor operasional dan beberapa bangunan vital seperti Istana Kepresidenan, Stasiun Radio, dan Pusat Telekomunikasi harus diduduki dengan maksud menguasai kota serta penduduknya.

Pada tanggal 29 September 1965, pukul 10.00 pagi, Kolonel Abdul Latief mengadakan briefing di Lubang Buaya dengan para pemimpin berbagai kesatuan “Gerakan”. Di sini, Latief memberitahukan kepada mereka, bahwa Hari-H adalah 1 Oktober 1965, dan jam adalah pukul 04.00 pagi. Pada pukul 2.30 pagi dini hari tanggal 1 Oktober 1965, Letnan Satu Dul Arief selaku pimpinan Kesatuan Pasopati dari “Gerakan 30 September” memeriksa barisannya di Lubang Buaya pada sebidang lapangan dipinggiran Pangkalan Udara Halim, sebelah tenggara

Jakarta. Kesatuan Pasopati dibagi dalam tujuh sub-kesatuan. Setiap sub kesatuan bertanggung jawab untuk menculik serta membawa ke pangkalan Lubang Buaya masing-masing satu Jendral dalam daftar yang dibuat para pengkhianat. Kesatuan – kesatuan tersebut diatur sebagai berikut:

1. sub kesatuan yang bertanggung jawab untuk menculik Jendral Abdul Haris Nasution dibawah komando Pembantu Letnan jahuruh dari Resimen Tjakrabirawa, yang terdiri dari satu regu Batalyon I Resimen Tjakrabirawa, satu peleton masing-masing dari Batalyon Pasukan Para 454 dan 530, Kesatuan Paukan Para Angkatan Udara, dan satu peleton “sukarelawan” dan Pemuda Rakyat.

- 2 Sub kesatuan yang disertai menculik Letnan Jendral Achmad Yani di bawah komando Pembantu Letnan Satu Mukidjan dari Brigade I, terdiri dari masing-masing satu peleton dan Brigade Infanteri I, Batalyon Pasukan Para 454 dan 530, satu regu dari Tjakrabirawa dan dari Kesatuan Pasukan Para Angkatan Udara serta dua regu dari Pemuda Rakyat.

3. Sub kesatuan yang ditugasi untuk menculik Mayor Jendral Suprpto di bawah komando Sersan Kepala Sulaiman dari Tjakrabirawa, yang terdiri dari dua regu Resimen Tjakrabirawa.

4. Sub kesatuan yang mendapat tugas untuk menculik Mayor Jendral S. Parman di bawah komando Sersan Mayor Satar dari Tjakrabirawa, yang terdiri dari satu regu Resimen Tjakrabirawa dan satu peleton dari Batalyon 530.

5. Sub kesatuan yang bertanggung jawab untuk menculik Brigadir Jendral Sutojo Siswomihardjo di bawah komando Sersan Mayor Surono dari Tjakrabirawa, yang terdiri dari tiga regu Resimen Tjakrabirawa.

6. Sub kesatuan yang mendapat tugas menculik Mayor Jendral M.T. Harjono di bawah komando Sersan Kepala Bungkus dari Tjakrabirawa, terdiri dari tiga regu yang berasal dari resimen bentukan sendiri.

7. Sub kesatuan dengan tugas menculik Brigadir Jendral D.I. Pandjaitan di bawah komando Sersan Mayor Sukardjo dari Batalyon Kesatuan Para 454, yang terdiri dari masing-masing satu regu Brigade Infanteri 434 dan Brigade Infanteri I.

Dalam briefingnya, Letnan Dul Arief masih tetap mengemukakan cerita mengenai adanya komplotan “Dewan Jendral” dan memberitahukan kepada para komandan sub kesatuan, bahwa para jenderal yang segera akan mereka culik adalah orang-orang yang merencanakan suatu perebutan kekuasaan. Oleh karena itu mereka harus ditangkap dan dibawa ke pangkalan Lubang Buaya, tidak peduli dalam keadaan hidup ataupun mati (Nugroho, 2008:17).

Gerakan 30 September ini adalah gerakan yang bertujuan untuk dapat mengkuadeta pemerintahan Indonesia, tetapi berhasil digagalkan. Mengapa G 30S/PKI gagal? Kegagalan pelaksanaan KUP G30SPKI dini hari 1 Oktober 1965 itu bermuara dari kepemimpinan *top leader* PKI D.N Aidit, dia dinilai tidak mampu dan salah dalam mengambil keputusan pada saat-saat kritis pelaksanaan kup, dan kesalahan prinsip dalam melakukan kup pada tanggal 1 Oktober itu adalah bahwa PKI tidak melakukannya secara serentak di seluruh Indonesia. Khusus di pulau Jawa gerakan serentak mutlak harus dilakukan (Samsudin, 45-

47:2005). Kesalahan fatal yang dilakukan Aidit adalah bahwa dia telah meninggalkan Jakarta dan lari ke Jawa Tengah. Seharusnya dia tidak melakukan itu dia harus tetap tinggal di Jakarta sesulit apapun keadaannya (Samsudin, 2005:90).

Setahun kemudian partai dilarang, ratusan ribu anggotanya dipenjarakan atau dibunuh, Jenderal Soeharto memang ditugaskan atau diberi wewenang oleh Presiden Soekarno untuk memulihkan ketertiban dan keamanan yang terganggu oleh Gerakan 30 September. Operasi penghancuran PKI tahun 1965 memandirikan Angkatan Darat secara jauh lebih radikal ketimbang tindakan pimpinan Angkatan Darat sebelumnya. Sebab dilakukan terbuka, terang-terangan melawan kebijakan Presiden di muka khalayak ramai. Kewibawaan Presiden Soekarno yang tidak mampu mencegahnya dirong-rong dan lagipula ditujukan untuk memusnahkan partai politik yang merupakan pendukung paling kuat dari beliau sehingga makin melemahkan kekuasaannya.

Pengejaran, penangkapan dan pembunuhan massal juga dilakukan oleh rakyat. Tetapi berbeda dengan apa yang diajarkan selama Orde Baru tidak terjadi spontan, tanpa campur-tangan Angkatan Darat, melainkan selalu konteks operasi penghancuran PKI. Operasi militer tersebut memang memperhitungkan, menyiapkan, merekayasa dan membiarkan rakyat turut melakukan pembunuhan massal tersebut (Paul, 2017:10)

2.1.4 Semiotika

Secara etimologis, istilah semiotik berasal dari kata Yunani *semeion* yang berarti “tanda”. Tanda itu sendiri didefinisikan sebagai sesuatu yang atas dasar

konvensi sosial yang terbangun sebelumnya, dapat dianggap mewakili sesuatu yang lain (Sobur, 2009:95). “Tanda” pada masa itu masih bermana sesuatu hal yang menunjuk pada adanya hal lain. Contohnya, asap menandai adanya api.

Semiotika adalah metode yang dipakai untuk menganalisis tanda-tanda (*sign*). Pendekatan semiotika memberikan perangkat analisis kepada peneliti yang terlihat tidak asing dengan objek yang diamati dan ide-ide tentang fesyen yang sepertinya terlihat asing, dan tidak ada objek yang diterima begitu saja (Lecy, 1998:56 dalam Rachmah Ida, 2016:17)

Semiotika dalam istilah *Ferdinand de Saussure* (1857-1913) adalah sebuah ilmu yang mengkaji kehidupan tanda-tanda ditengah masyarakat. Tujuannya untuk menunjukkan bagaimana terbentuknya beserta kaidah-kaidah yang mengaturnya. (Sobur, 2013:96).

Charles S. Peirce, menjelaskan bahwa salah satu bentuk tanda adalah kata. Sedangkan objek adalah sesuatu yang dirujuk tanda. Sementara interpretasi adalah sebuah tanda. Apabila ketiga elemen makna itu berinteraksi dalam benak seseorang, maka muncullah makna tentang sesuatu yang diwakili oleh tanda tersebut. (Sobur, 2009:115)

Batasan yang paling jelas dikemukakan Preminger (2001:89). Dikatakan, “Semiotik adalah ilmu tentang tanda-tanda. Ilmu ini menganggap bahwa fenomena sosial/masyarakat dan kebudayaan itu merupakan tanda-tanda. Semiotik itu mempelajari sistem-sistem, aturan-aturan, konvensi-konvensi yang memungkinkan tanda-tanda tersebut mempunyai arti” (Sobur, 2009:95)

Sekurang kurangnya terdapat sembilan macam semiotik yang kita kenal sekarang, (Mansoer Pateda, 2010:29-32) yaitu :

Tabel 2.1 aneka semiotik

| | |
|---------------------------------------|---|
| <i>Semiotik analitik</i> | Yakni semiotik yang menganalisis sistem tanda. Peirce menyatakan bahwa semiotik berobjekkan tanda dan menganalisisnya menjadi ide, objek, dan makna. Ide dapat dikatakan sebagai lambang, sedangkan makna adalah beban yang terdapat dalam lambang yang mengacu kepada objek tertentu |
| <i>Semiotik deskriptif</i> | Yakni semiotik yang memperhatikan sistem tanda yang dapat kita alami sekarang, meskipun ada tanda yang sejak dahulu tetap seperti yang disaksikan sekarang. Misalnya, langit yang mendung menandakan bahwa hujan tidak lama lagi akan turun, dari dahulu hingga sekarang tetap saja seperti itu |
| <i>Semiotika faunal (zoosemiotic)</i> | Yakni semiotik yang khusus memperhatikan sistem tanda yang dihasilkan oleh hewan. Hewan biasanya |

| | |
|---------------------------------|---|
| | <p>menghasilkan tanda untuk dapat berkomunikasi sesamanya, tetapi sering juga menghasilkan tanda yang dapat ditafsirkan oleh manusia. Misalnya, seekor ayam betina yang berkokok menandakan ayam itu telah bertelur atau ada sesuatu yang ditakuti.</p> |
| <p><i>Semiotik kultural</i></p> | <p>Yakni semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang berlaku dalam kebudayaan masyarakat tertentu. Telah diketahui bahwa masyarakat sebagai makhluk sosial memiliki sistem budaya tertentu yang telah turun temurun dipertahankan dan dihormati. Budaya yang terdapat dalam masyarakat yang juga merupakan sistem itu, menggunakan tanda-tanda tertentu yang membedakannya dengan masyarakat yang lain.</p> |
| <p><i>Semiotik naratif</i></p> | <p>Yakni semiotik yang menelaah sistem tanda dalam narasi yang berwujud mitos dan cerita lisan, ada di antaranya memiliki nilai kultural tinggi, itu</p> |

| | |
|----------------------------|--|
| | <p>sebabnya Greimas (1987) memulai pembahasannya tentang nilai-nilai kultural ketika ia membahas persoalan semiotik naratif</p> |
| <i>Semiotik natural</i> | <p>Yakni semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang dihasilkan oleh alam. Air sungai keruh menandakan di hulu telah turun hujan .</p> |
| <i>Semiotik normatif</i> | <p>Yakni semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang dibuat oleh manusia yang berwujud norma-norma, misalnya rambu-rambu lalu lintas.</p> |
| <i>Semiotika sosial</i> | <p>Yakni semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang dihasilkan oleh manusia yang berwujud lambang, naik lambang berwujud kata maupun lambang yang berwujud kata dalam satuan yang disebut kalimat. Buku Halliday (1978) itu sendiri berjudul <i>Language Social Semiotic</i>. Dengan kata lain, semiotik sosial menelaah sistem tanda yang terdapat dalam bahasa.</p> |
| <i>Semiotik struktural</i> | <p>Yakni semiotik yang khusus menelaah</p> |

| | |
|--|---|
| | sistem tanda yang dimanifestasikan melalui struktur bahasa. |
|--|---|

Dalam penelitian ini penulis menggunakan *Semiotika analitik* yaitu semiotik yang menganalisis sistem tanda. Pierce menyatakan bahwa semiotik berobjekkan tanda dan menganalisisnya menjadi ide, objek, dan makna. Ide dapat dikatakan sebagai lambang, sedangkan makna adalah beban yang terdapat dalam lambang yang mengacu kepada objek tertentu.

2.1.5 Semiotika Charles Sanders Pierce

Charles Sanders Pierce adalah seorang filsuf Amerika yang paling orisinal dan multidimensional, Pierce adalah seorang pemikir yang sangat argumentatif. Pierce lahir dalam sebuah keluarga intelektual pada tahun 1839 (ayahnya, Benjamin adalah seorang profesor matematika di Harvard).

Pierce terkenal dengan teori tandanya. Di dalam lingkup semiotika, Pierce, sebagaimana dipaparkan Lechte (2001:227), seringkali mengulang-ulang bahwa secara umum tanda adalah yang mewakili sesuatu bagi seseorang.

Bagi Pierce, tanda “*is something which stands to somebody for something in some respect or capacity*”. Sesuatu yang digunakan agar tanda bisa berfungsi oleh Pierce disebut *ground* .(Sobur, 2016:41). Berdasarkan obyeknya, Pierce membagi tanda atas *icon* (ikon), *index* (indeks), dan *symbol* (simbol). *Ikon* adalah tanda yang hubungan antara penanda dan pertandanya bersifat bersamaan bentuk alamiah. Atau dengan kata lain, *ikon* adalah hubungan antara tanda dan objek atau acuan yang bersifat kemiripan; misalnya, potret dan peta. *Indeks* adalah tanda

yang menunjukkan adanya hubungan alamiah antara tanda dan petanda yang bersifat kausal atau hubungan sebab akibat, atau tanda yang langsung mengacu pada kenyataan. Contoh yang paling jelas ialah asap sebagai tanda adanya api. Tanda dapat pula mengacu ke *denotatum* melalui konvensi. Tanda seperti itu adalah tanda konvensional yang biasa disebut *simbol*. Jadi, *simbol* adalah tanda yang menunjukkan hubungan alamiah antara penanda dengan petandanya. Hubungan di antaranya bersifat arbitrer atau semena, hubungan berdasarkan konvensi (perjanjian) masyarakat. (Sobur, 2016:41-42).

Tabel 2.2 Trikotomi Charles Sanders Peirce (Rachmah Ida, 2016:79)

| | Icon | Index | Symbol |
|------------|----------------|-------------------|------------------|
| Penandaan: | Obyek/karakter | Sebab-akibat | Konvensi |
| Contoh: | Foto | Api-asap | Bahaya |
| Proses: | Dapat dilihat | Dapat digambarkan | Harus diperjelas |

Berdasarkan *interpretan*, tanda (*sign*, *representamen*) dibagi atas *rheme*, *dicent sign* atau *decisign* dan *argument*. *Rheme* adalah tanda yang memungkinkan orang menafsirkan berdasarkan pilihan. Misalnya, orang yang merah matanya dapat saja menandakan bahwa orang itu baru menangis, atau menderita penyakit mata, atau mata dimasuki insekta, atau baru bangun, atau ingin tidur. *Dicent sign* atau *decisign* adalah tanda sesuai kenyataan. Misalnya, pada suatu jalan sering terjadi kecelakaan, maka di tepi jalan dipasang rsambu lalu lintas yang menyatakan disitu sering terjadi kecelakaan. *Argument* adalah tanda yang langsung memberikan alasan tentang sesuatu (Sobur, 2016:42)

Interpretan adalah apa yang memastikan dan menjamin validitas tanda, walaupun penginterpretasi tidak ada. Menurut Peirce Interpretan adalah apa yang

diproduksi tanda di dalam kuasi-pikiranlah yang jadi penginterpretasi, namun dia juga dapat dipahami sebagai definisi representamen (dan oleh karena itu, intensinya) (Eco, 2009:99).

Tanda (*sign* atau *representamen*) selalu terdapat dalam hubungan triadik, yakni *ground*, *object*, dan *interpretan*. Atas dasar hubungan ini Piercemengadakan klasifikasi tanda. Tanda yang dikaitkan dengan *ground* dibaginya menjadi *qualisign*, *sinsign*, dan *legisign*. *Qualisign* adalah kualitas yang ada pada tanda, misalnya kata-kata kasar, keras, lemah, lembut, merdu. *Sinsign* adalah eksistensi aktual benda atau peristiwa yang ada pada tanda, misalnya, kata *kabur* atau *keruh* yang ada pada urutan kata *air sungai keruh* yang menandakan bahwa ada hujra di hulu sungai. *Legisign* adalah norma yang dikandung oleh tanda, misalnya, rambu lalu lintas yang menandakan hal-hal yang boleh atau tidak boleh dilakukan manusia (Sobur, 2016:41).

2.1 Penelitian terdahulu

Ahmad Sigit Kurniawan, Dinamika PKI Di Indonesia tahun 1950-1965.

Dinamika PKI di Indonesia tahun 1950-1965 mengalami pasang surut. Pasca peristiwa Madiun Affair, PKI mampu bangkit dari keterpurukan untuk tampil dalam perpolitikan Indonesia dan mampu mempertahankan eksistensi partai selama Demokrasi Liberal. Strategi yang digunakan selama masa Demokrasi Liberal adalah strategi font persatuan nasional. Pada saat demokrasi terpimpin PKI menggunakan strategi opensif manipolis dan opensif revolusioner. Pada masa tersebut perkembangan PKI semakin besar. Hal tersebut tampak pada keanggotaan yang semakin banyak serta kedekatan PKI dengan presiden Sukarno

yang mengkhawatirkan golongan Angkatan Darat sebagai golongan yang menentang PKI. Konflik antara PKI dan Angkatan Darat semakin memuncak memasuki tahun 1965, dan peristiwa G30S/PKI menandai berakhirnya gerakan PKI di Indonesia.

Alfian Dwi Kurniawan, Memori Kolektif Mengenai PKI dan Komunisme di Media Sosial. Memori kolektif mengenai PKI dan Komunisme di Media Sosial berada dalam dua wacana besar, yakni wacana antikomunis dan wacana HAM. Wacana antikomunis dan wacana HAM berada dalam oposisi, sehingga kontruksi memori yang didasarkan pada wacana yang satu tidak memiliki konsepsi masalah yang sama dengan yang lain. Di dalam wacana anti komunis, terdapat dua bentuk memori, yakni memori dominan dan memori penanda kosong, sementara itu di dalam wacana HAM terdapat satu bentuk memori, yaitu kontra memori

Iva Setiamah, Kemiskinan dan Tragedi Politik Tahun 1965 (Analisis Semiotika dalam Film Sang Penari: Ronggeng Dukuh Paruk), menganalisis bagaimana kemiskinan pada saat tahun 1965 yang menimpa Dukuh Paruk, dimana warga Dukuh Paruk hanya bekerja kepada tuan tanah, kemudian mengenai pangan, warga Dukuh Paruk hanya mengkonsumsi tempe bongkreng yang pada suatu waktu pengolahan tempe tersebut mengandung racun dan menyebabkan kematian seorang ronggeng di desa tersebut dan memicu keributan. Kemudian, penangkapan warga desa Dukuh Paruk dan pembantaian massal terhadap orang-orang PKI dan siapapun yang dianggap memiliki hubungan dengan PKI yang dilakukan oleh TNI-AD

2.2 Kerangka pemikiran

Kemiskinan dan tragedi politik yang pernah terjadi di Indonesia tidak hanya dirasakan di dalam kehidupan nyata pada tahun 1965, akan tetapi digambarkan melalui sebuah film, salah satu film yang relevan untuk menggambarkan kondisi tersebut adalah film Sang Penari



Pada penelitian ini, objek penelitian adalah film maka dari itu pendekatan yang digunakan adalah Semiotika Charles Sander Pierce, dengan menggunakan segitiga makna (*triangle of meaning*) yang terdiri dari atas *sign* (tanda) bentuk tanda adalah kata, *object* (objek) adalah yang dirujuk tanda dan *interpretan* (interpretan) adalah sebuah tanda, ketika ketiga elemen makna itu berinteraksi dalam benak seseorang maka akan muncul tentang sesuatu yang diwakili oleh tanda pada film tersebut.



Berdasarkan analisis diatas, terdapat bentuk gambaran mengenai kemiskinan dan tragedi politik tahun 1965 yang telah dipotong ke dalam beberapa *scene* pada film Sang Penari.

